



# RENCANA KERJA RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA TAHUN 2022



Alamat :  
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram  
Kode Pos 83237  
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515  
Email : [rsjmutiarasukma@gmail.com](mailto:rsjmutiarasukma@gmail.com)  
Website: [rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id](http://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur. Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Rancangan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan RSJ Mutiara Sukma tahun 2022 yang merupakan dokumen awal perencanaan tahunan pembangunan kesehatan RSJ Mutiara Sukma tahun 2022 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Rancangan Awal Renja ini disusun sebagai arah dan acuan awal sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Civitas Hospitalia RSJ Mutiara Sukma dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arahan kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023. Rancangan Renja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan RSJ Mutiara Sukma yang direncanakan akan dilaksanakan tahun 2022.

Kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyusun Rancangan Awal Renja ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan didasarkan pada data yang ada. Tujuannya agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSJ Mutiara Sukma yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rancangan Awal Renja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Besar harapan kami agar usulan awal program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam rancangan awal Renja ini dapat terealisasi sehingga pelayanan RSJ Mutiara Sukma lebih efektif dan efisien, dan sesuai dengan yang diharapkan oleh berbagai pihak. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Rancangan Renja tahun 2022 ini.

Mataram, Agustus 2021  
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa  
MUTIARA SUKMA

**Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19640805 199603 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSJ MUTIARA SUKMA TAHUN 2020.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSJ Mutiara Sukma .....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma .....	21
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSJ Mutiara Sukma.....	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP.....	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RSJ MUTIARA SUKMA .....	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSJ Mutiara Sukma .....	50
3.3 Program Kegiatan.....	51
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSJ MUTIARA SUKMA.....	63
4.1 Sumber Daya RSJ Mutiara Sukma.....	64
BAB V : PENUTUP.....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akumulasi dari seluruh rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dipakai sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Rancangan Renja Tahun 2022, merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

Penyusunan Renja RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu-satunya yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa mempunyai kewajiban mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah dalam rangka ikut memberikan kontribusi terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penyusunan Renja Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023 yang telah disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan bagi seluruh komponen RSJ Mutiara Sukma dalam menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan khususnya kesehatan jiwa pada tahun 2022.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan, RSJ yang ada di seluruh Indonesia sudah memperbaiki struktur organisasi mereka dengan komposisi minimal dimana Rumah Sakit Khusus kelas B dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi 2 (dua) Direktorat yang masing-masing Direktorat membawahi 2 (dua) bidang

atau 2 (dua) bagian. Masing-masing bidang membawahi 2 (dua) seksi dan masing-masing bagian membawahi 2 (dua) sub bagian.

Berdasarkan fakta dan data di atas RSJ Mutiara Sukma merubah struktur sesuai kondisi yang ada sekarang yaitu struktur organisasi rumah sakit khusus kelas B sehingga kewajiban-kewajiban, tugas pokok serta fungsi sesuai beban kerja dari masing-masing eselon. Pada tanggal 23 Desember 2019 ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSJ Mutiara Sukma, yang pelaksanaannya mulai diterapkan pada bulan Februari tahun 2020.

Pada tahun 2022, fokus pelayanan RSJ Mutiara Sukma adalah pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan langsung di dalam gedung (*intramural*) dan pelayanan di luar gedung (*ekstramural*). Penyediaan sarana prasarana, SDM yang kompeten dan regulasi pendukung menjadi keharusan untuk dipenuhi, sehingga dapat mewujudkan Pembangunan Kesehatan berdasarkan pada prikemansiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta bisa bermanfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan dan keluarga miskin.

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu-satunya Rumah Sakit yang menyelenggarakan rawat inap pasien gangguan jiwa di NTB dalam tahap perawatan rawat inap tersebut, dibutuhkan layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang juga menderita penyakit infeksi penyerta seperti penyakit-penyakit infeksi menular pada pernapasan atau infeksi menular pada kulit. Perawatan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan penyakit infeksi menular perlu dipisahkan dari pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang lain agar infeksi yang dideritanya tidak menular ke pasien ODGJ yang lain. Pemisahan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan penyakit infeksi menular dapat dipisahkan menurut jenis transmisinya, airborne, droplet atau kontak termasuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Covid-19.

Renja merupakan dokumen yang memuat rencana kerja RSJ Mutiara Sukma untuk 1 (satu) tahun ke depan dan memuat evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kebijakan dan program prioritas RSJ Mutiara Sukma, anggaran yang dibutuhkan, sasaran, indikator dan target yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. Renja RSJ Mutiara Sukma merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya. Renja RSJ Mutiara Sukma dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dan merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama untuk satu tahun mendatang.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja RSJ Mutiara Sukma tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H ayat 1 yang menegaskan tentang Hak untuk Hidup Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang Baik, Sehat dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang pengesahan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
9. Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Infeksi di fasilitas kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah.
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
  27. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  28. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;
  29. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

30. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.56 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
32. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No 440-344 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB menjadi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
33. Surat Keputusan Gubernur nomer 445-541/2020 tentang Penunjukkan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB sebagai RS Rujukan COVID khusus Jiwa;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 adalah untuk merumuskan rencana kerja RSJ Mutiara Sukma untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Review Rencana Strategis (Renstra) RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019-2023 dan perubahan-perubahan yang terjadi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana kerja ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Terlaksananya program prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan, guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan RSJ Mutiara Sukma sebagai penjabaran Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019-2023;
- b. Ditetapkannya program dan kegiatan RSJ Mutiara Sukma Tahun 2022 dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Menjadi tolak ukur pelaksanaan dan evaluasi kinerja seluruh program dan kegiatan RSJ Mutiara Sukma pada Tahun 2020;
- d. Tersusunnya rencana anggaran RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2022;

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja RSJ Mutiara Sukma tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **BAB I      Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja 2022.

### **BAB II     Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020**

- 2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSJ Mutiara Sukma.
- 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma
- 2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSJ Mutiara Sukma
- 2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III    Tujuan dan Sasaran RSJ Mutiara Sukma**

- 3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2    Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2022
- 3.3    Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022

### **BAB IV    Rencana Kerja dan Pendanaan RSJ Mutiara Sukma**

Memuat tentang rincian kebutuhan anggaran RSJ Mutiara Sukma dalam menjalankan program kegiatannya dan pendanaan program kegiatan RSJ Mutiara Sukma yang bersumber dari APBD (subsidi), BLUD maupun APBN (DAK, Dekon, dan TP), sumber daya yang dimiliki serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif (prakiraan tahun 2022).

### **BAB V     Penutup**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ada ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020**

#### **RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

Evaluasi Rencana Kerja tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja, efektifitas program, masalah dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program melalui pencapaian indikator yang telah ditetapkan, baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi diharapkan dapat dipergunakan untuk program peningkatan kinerja atau produktivitas, pengembangan organisasi dan menghindari hambatan yang mungkin akan terjadi. Evaluasi atau pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja, standar baku atau pencapaian tahun sebelumnya. Pengukuran Kinerja RSJ Mutiara Sukma didasarkan pada realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja 2020.

Fokus utama kinerja tahun 2020 tetap pada peningkatan mutu pelayanan yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pelayanan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama pencapaian nilai kepuasan pelanggan. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang mulai diterapkan di RSJ Mutiara Sukma tahun 2012 memberi peluang bagi RSJ Mutiara Sukma untuk mengembangkan program kegiatan dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan karena PPK-BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan bagi RSJ Mutiara Sukma, sehingga program kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien.

#### **2. PRIORITAS KERJA RSJ MUTIARA SUKMA TAHUN 2020**

Prioritas kerja RSJ Mutiara Sukma antara lain:

- a) Resurvey Akreditasi SNARS Edisi 1.
- b) Peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
- c) Evaluasi dan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d) Peningkatan disiplin pegawai, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM).
- e) Revisi terhadap beberapa PERGUB Tata Kelola, SPM, dan pola tarif.

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020 Dan Capaian Renstra RSJ Mutiara Sukma**

Rencana program kerja RSJ Mutiara Sukma pada Tahun 2020 disusun berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan, mendekatkan akses masyarakat ke pelayanan jiwa dan pengembangan pelayanan melalui program-program sebagai berikut:

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran**
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
  - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
  - Pendidikan dan pelatihan formal
- 4. Program upaya kesehatan masyarakat**

Program Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan wujud kepedulian RSJ Mutiara Sukma pada masalah kesehatan terutama kesehatan jiwa yang bersifat preventif, promotif dan kuratif. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan 2 kegiatan berupa peningkatan kesehatan masyarakat serta peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Berikut rincian dari masing-masing kegiatan:

### **a) Peningkatan kesehatan masyarakat**

Adapun rincian sub kegiatan dari peningkatan kesehatan masyarakat antara lain:

- 1) *Self Help Group* (SHG) yaitu kegiatan pemberdayaan kelompok swabantu yang ada di masyarakat yang anggotanya dapat terdiri dari pasien, keluarga pasien atau pemerhati Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dimana kegiatan kelompok ini berkoordinasi dan dipandu oleh tim keswamas.
- 2) Kegiatan *outing* yang bertujuan untuk penyegaran bagi pasien yang telah mengikuti kegiatan rehabilitasi Napza yang sangat padat serta untuk mempersiapkan pasien kembali ke lingkungan masyarakat.
- 3) Kegiatan *home visit* lebih difokuskan pada penanganan pasien pasung dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien pasung, baik

yang pernah dirawat namun tidak pernah lagi menjalani perawatan setelah kembali ke rumah atau kasus pasung yang baru.

- 4) Integrasi dan *mobile clinic* adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya, serta mampu berperan aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa. Sasaran kegiatan ini adalah dokter dan petugas kesehatan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan tentang pelayanan kesehatan jiwa.
- 5) Deteksi kesehatan jiwa anak sekolah.
- 6) Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

**b) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan**

Rincian *sub* kegiatan dari peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan antara lain:

- 1) *Family Support Group*
- 2) Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial
- 3) Pelayanan pasien tidak mampu, terlantar yang gangguan jiwa
- 4) *Dropping* dan rujukan pasien adalah upaya RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya setelah selesai menjalani perawatan dan tidak mampu dijemput kembali oleh keluarganya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya
- 5) Penanggulangan bencana
- 6) *Assertive Community Therapy* (ACT) atau terapi komunitas adalah bentuk terapi yang berusaha memanipulasi lingkungan untuk keuntungan pasien di lingkungan sosialnya. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus penyalahgunaan Napza atau individu dengan gangguan/ketidakmampuan fungsi normal kehidupannya atau keluarga yang tidak mampu melakukan perawatan terhadap pasien yang mengalami masalah kejiwaan di masyarakat. Program ACT didesain untuk menurunkan hospitalisasi, meningkatkan kemandirian, fungsi dan produktifitas individu serta memberi *support* pada keluarga. Dalam pelaksanaannya terapi ini

membutuhkan tim yang terdiri dari multidisiplin ilmu seperti psikiater, dokter, perawat dan seorang koordinator.

**5. Program standarisasi pelayanan kesehatan**

Program standarisasi pelayanan kesehatan merupakan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (Penilaian Akreditasi SNARS edisi 1), dimana pada tahun 2019 RSJ Mutiara Sukma melaksanakan Penilaian Akreditasi SNARS edisi 1. RSJ Mutiara Sukma berhasil mempertahankan akreditasi paripurna, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2022.

**6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSJ Mutiara Sukma:**

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana antara lain:

- a) Pembangunan rumah sakit
- b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
- c) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
- d) Pengadaan mebeleur rumah sakit
- e) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)

**7. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RSJ Mutiara Sukma**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program pemeliharaan sarana dan prasarana RSJ Mutiara Sukma hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/berkala rumah sakit.

**8. Program Kerja Bersumber Dana BLUD**

Rencana program kerja RSJ Mutiara Sukma yang bersumber dari dana BLUD adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD dengan kegiatan melaksanakan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD melalui upaya-upaya antara lain:

• **UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF**

Upaya Promotif dan Preventif pada RSJ Mutiara Sukma antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan PKRS
- b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- c. Pelayanan administrasi

- **UPAYA KURATIF (PENGOBATAN)**

Upaya Kuratif (Pengobatan) pada RSJ Mutiara Sukma antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan jiwa IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan
- b. Pelayanan penunjang: Gizi, IPSRS, Diklat, Farmasi dan Laboratorium

- **UPAYA REHABILITATIF**

Upaya rehabilitatif pada RSJ Mutiara Sukma antara lain:

- a. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- b. Pelayanan Rehabilitasi Napza dan HIV/AIDS
- c. Pelayanan Rehabilitasi Medik

**Tabel T-C.1.**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RSJ MUTIARA SUKMA**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

## Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	$8=(7/6) * 100$	<i>9</i>	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	-	-	-	-	-	100	100	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	280					250	250	89,28%
-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya SPM	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas	Jumlah orang	291	158	39	39	100	-	197	67,70%

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6) * 100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	dan fungsi									
-	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaporkan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan	12	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	2	-	1	1	100	-	1	33,33%
-	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan	Jumlah jenis sumber daya	3	3	3	3	100	3	3	100%

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6) * 100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	listrik									
-	<b>Peningkatan pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase realisasi pendapatan BLUD</b>	-	-	-	-	-	<b>56,45</b>	<b>56,45</b>	-
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah realisasi pendapatan BLUD	70.097.842.944	16.724.262.701	14.718.499.655,11	23.912.559.721,41	162,47	19,500,000,000	60.136.822.422,41	85,79%
2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>								
		<b>Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar</b>								
-	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan</b>	-	-	-	-	-	<b>89</b>	<b>89</b>	-

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6) * 100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	3	-	1	-	-	1	1	50%
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit	16	4	-	-	-	-	4	133,33%
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	368	36	78	78	100	19	133	71,12%
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit	380	-	72	72	100	17	89	51,15%
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	176	5	81	81	100	41	127	88,81%
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	13	13	13	100	13	13	100%
-	<b>Penyediaan layanan kesehatan</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	-

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6) * 100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi									
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	12,960	-	-	-	-	4,277	4,277	33%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	106,380	38,759	33,000	34,457	104,42	34,900	108,116	101,63%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	960	-	-	-	-	300	300	31,25%

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6) * 100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	238	31	65	86	132,308	78	195	81,93%
	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	1,621					531	531	32,70%
-	<b>Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi</b>	-	-	-	-	-	<b>80</b>	<b>80</b>	-
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Nilai tindak lanjut akreditasi dari rekomendasi perencanaan perbaikan	80	80	80	80	100	-	-	-
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Persentase peningkatan pakasitas SDM</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	-

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6) * 100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	<b>Kesehatan</b>									
-	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji Non ASN	-	-	-	-	-	100	100	-
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai Non ASN/Kontrak	155	-	-	-	-	143	143	92,25%

**Catatan :** Isi dari tabel Target dan Realisasi di atas untuk tahun 2019-2020 masih menggunakan Permendagri yang lama (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006), sedangkan untuk Target dan Realisasi tahun 2021 menggunakan Permendagri Terbaru (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) sesuai Renstra.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

**a. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**

- Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi tahun 2020 indikator pada kegiatan ini mencapai target yaitu 39 orang pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga realisasi tercapai 100% .
- Pada Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan tahun 2020 indikator pada kegiatan ini mencapai target dengan pengadaan 1 jumlah unit kendaraan dinas operasional.
- Pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik telah tercapai 100% dengan jumlah pemakaian internet pertahun sebesar 120 MBPS. Sedangkan untuk pemakaian listrik pertahun sebesar 147 KVA. Dan untuk kebutuhan air tahun 2020 relatif mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan.
- Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD indokator pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD telah melampaui target dari target yang ditentukan sebesar Rp.14.718.499.655,11 dan tercapai sebesar Rp.23.912.559.721,41 atau 162,47%. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi klaim Covid-19 dan realisasi Klaim BPJS.

**b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**

- Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi telah Tercapainya/terselenggaranya alat kesehatan sesuai standar, pengadaan prasarana fasilitas kesehatan yang sesuai standar, barang penunjang operasional serta terselenggaranya Obat, Vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan.
  - Pada sub kegiatan pengembangan rumah sakit tahun 2020 RSJ Mutiara Sukma membangun 1 gedung baru yaiku Gedung Evakuasi pasien jiwa.
  - Pada sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasitas layanan kesehatan RSJ Mutiara Sukma telah membeli alat kesehatan untuk mendukung pelayananan di rsj ms.
  - Pada sub kegiatan pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan serta pengadaan barang penunjang opereasional RS, RSJ Mutiara Sukma telah membeli prasarana sesuai standar untuk menunjang pelayanan kesehatan.
  - Pada sub kegiatan pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya, RSJ Mutiara Sukma membeli obat-obatan jiwa sebanyak 13 jenis obat.

- Pada kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi telah tercapainya target kegiatan untuk pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) serta pengelolaan pelayanan kesehatan khusus.
- Pada kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi, kegiatan survey akreditasi RS yang semestinya dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga RSJ Mutiara Sukma melakukan kegiatan *Self Assessment* dan dari kegiatan ini RSJ Mutiara Sukma dapat mempertahankan status akreditasi paripurna.

## **2.2 Analisis kinerja pelayanan RSJ Mutiara Sukma**

Analisis kinerja pelayanan RSJ Mutiara Sukma didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel T-C.2.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca tat an
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	S/d Juni 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			-	-	-	79	-	-	79	81	
-	Administrasi keuangan perangkat daerah			-	-	-	100	-	98,40	100	100	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			-	-	250	265	-	246	265	280	
-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			-	-	-	60	-	-	60	60	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			158	39	-	282	39	-	282	291	
-	Administrasi Umum perangkat daerah			-	-	-	100	-	-	100	100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			-	-	-	12	-	-	12	12	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca tat an
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	S/d Juni 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			-	-	-	100	-	-	100	100	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan			-	1	-	1	1	-	1	1	
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			-	-	-	100	-	3	100	100	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			3	3	3	3	3	3	3	3	
-	Peningkatan pelayanan BLUD			-	-	-	77,81	-	26,75	77,81	100	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD			16.724.262.701	14.718.499.655,11	19.500.000.000	23.426.982.332,63	23.912.559.721,41	9.241.552.998,29	23.426.982.332,63	27.170.860.611,66	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan						75			75	76,19	
				-	-	-	80	-	-	80	80	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca tat an
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	S/d Juni 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Masyarakat</b>											
-	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi			-	-	-	91	-	38,14	91	93	
	Pengembangan rumah sakit			-	1	1	1	-	-	1	1	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit			4	-	4	1	-	-	1	1	
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan			36	78	19	72	78	-	72	96	
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan			-	72	17	81	72	-	81	85	
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit			5	81	41	40	81	8	40	60	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca tat an
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	S/d Juni 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya			13	13	13	13	13	13	13	13	
-	<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>			-	-	-	<b>100</b>	-	47,47	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana			-	-	4,277	4,320	-	309	4,230	4,363	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)			38,759	33,000	34,900	35,460	34,457	18,781	35,460	36,020	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan			-	-	300	310	-	82	310	350	

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca tat an
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	S/d Juni 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	orang dengan kecanduan NAPZA											
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus			31	65	78	80	86	82	-	80	
	Operasional pelayanan rumah sakit					531	540	-	48	540	550	
-	<b>Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi</b>			-	-	-	80	-	-	80	80	
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan			-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			80	80	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>			-	-	-	100	-	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca tat an
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	S/d Juni 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
-	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi			-	-	-	100	-	100	100	100	
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan			-	-	143	150	-	143	150	155	

**Hasi Evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut:**

**1. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020.**

**A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Intramural**

**a) Pelayanan Rawat Jalan**

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kunjungan rawat jalan cenderung menurun. Tahun 2018 jumlah kunjungan sebesar 45.871 kunjungan, tahun 2019 turun sebesar 35.465 kunjungan dan tahun 2020 turun menjadi 31.599 kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dikarenakan adanya bencana non alam pandemi Covid-19 dimana terdapat pembatasan pelayanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma, dan juga disebabkan oleh penetapan peraturan sistem rujukan berjenjang program kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang tidak sepenuhnya terarah pada RSJ Mutiara Sukma sebagai rumah sakit rujukan, namun juga diarahkan pada RS kelas C yang memiliki pelayanan klinik psikiater.

**b) Pelayanan Rawat Inap**

Pelayanan rawat inap terdiri dari pelayanan kelas I, kelas II dan kelas III yang terbagi dalam 6 ruang perawatan untuk pasien gangguan jiwa dan 1 ruang perawatan detoksifikasi dan rehabilitasi NAPZA. Dalam 2 (dua) tahun terakhir jumlah kunjungan rawat inap mengalami fluktuatif dimana tahun 2018 jumlah pasien yang menjalani perawatan adalah 1.098 orang, tahun 2019 jumlah kunjungan rawat inap meningkat menjadi 1.602 kunjungan. Dan tahun 2020 kunjungan rawat inap menurun menjadi 1.341 kunjungan

Penurunan kunjungan tahun 2020 disebabkan oleh banyak hal, antara lain adanya bencana non alam pandemi (Covid-19) dimana terdapat pembatasan pelayanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma, khusus untuk kasus rehabilitasi NAPZA terjadi penurunan yang sangat bermakna akibat Peraturan Menteri RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bahwa pembiayaan yang ditanggung KEMENKES hanya dengan status PBI.

Seperti pada kunjungan rawat jalan, pemberlakuan JKN mengubah komposisi pasien berdasarkan status bayar. Tahun 2020 sebagian besar pasien rawat inap adalah pasien BPJS sebesar 77,85%.

**c) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)**

Sebagai RS Jiwa dengan Instalasi Kegawatdaruratannya yang khusus, maka kunjungan di IGD RSJ Mutiara Sukma terbanyak masih melayani kasus kegawatdaruratan psikiatri. Kunjungan ke IGD RSJ Mutiara Sukma tahun 2019 sebanyak 1,692 kunjungan dan menurun pada tahun 2020 menjadi 1.517 kunjungan.

Penurunan kunjungan ini dimungkinkan akibat adanya bencana non alam pandemi Covid-19 dimana terdapat pembatasan pelayanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma.

**d) Pelayanan ODGJ dengan COVID-19 (Penyakit Infeksi)**

Sejak diterapkannya RSJ Mutiara Sukma sebagai Rumah Sakit Rujukan darurat COVID-19 khusus untuk pasien ODGJ dengan COVID-19 (penyakit infeksi), maka jumlah kunjungan yang terhitung dari bulan mei-desember 2020 sebanyak 178 kasus, dengan rincian antara lain 166 kasus dengan kasus suspek covid-19 dan 12 dengan kasus terkonfirmasi covid-19, dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 12 TT, dimana ada 2 lokasi penempatan pelayanan pasien dengan covid-19 diantaranya: (1) Bangsal Organik dengan 4 TT, 3 diantaranya diruang bertekanan negatif dan 1 ruang Ventilasi Alami, (2) Ruang Kenanga dengan 8 TT yang keseluruhannya merupakan ruang Ventilasi Alami, ruang ventilasi alami adalah ruangan khusus untuk menempatkan pasien dengan diagnosa yang sama dengan memperhatikan jarak tempat tidur dan ventilasi yang baik.

**e) Pelayanan Rehabilitasi NAPZA**

Selain melayani pasien gangguan jiwa, tugas pokok lain dari RSJ Mutiara Sukma adalah penanganan pasien penyalahgunaan Napza khususnya kegiatan rehabilitasi

Berdasarkan laporan tahun 2020 jumlah kasus penyalahgunaan Napza yang direhabilitasi di RSJ Mutiara Sukma adalah 239 kasus, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 626 kasus

**f) Pelayanan Konseling dan HIV/AIDS**

Pelayanan HIV/AIDS di RSJ Mutiara Sukma dilaksanakan di unit Konseling Tes HIV/AIDS. Berdasarkan laporan jumlah klien yang menjalani test dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Tahun 2018 jumlah klien yang menjalani test adalah 1.351 klien menurun sebesar 29,90% jika dibandingkan

dengan tahun 2019 menjadi 947 klien, dan tahun 2020 jumlah klien yang menjalani test menurun sebesar 19% menjadi 767 klien.

Penurunan pelayanan konseing HIV/AIDS ini terjadi karena telah berkembangnya kemampuan fasilitas kesehatan lain dalam memberikan pelayanan VCT, dan terdapat pembatasan pelayanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma akibat adanya bencana non alam pandemi Covid-19.

**g) Pelayanan Rehabilitasi Psikososial**

Rehabilitasi psikososial adalah tahapan akhir dari perawatan pasien rawat inap untuk melatih kemandirian bagi pasien. Pelayanan rehabilitasi psikososial dikoordinir oleh instalasi rehabilitasi psikososial. Tujuannya untuk mempersiapkan pasien kembali ke keluarga dan masyarakat dengan memberikan beberapa terapi secara psikologis dan membekali mereka dengan berbagai keterampilan agar siap kembali ke masyarakat dan mampu kembali produktif dan berkarya, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat dan keluarganya. Jenis kegiatan yang dilakukan antara lain: 1) Remediasi Kognitif, 2) Psiko Edukasi sebanyak, 3) Terapi ADL, 4) Terapi Psikoreligi, 5) Terapi Relaksasi, Bermain dan Olahraga, 6) Terapi Okupasi dan Vokalisasi.

**h) Pelayanan Rehabilitasi Medik**

Pelayanan rehabilitasi medik tahun 2018 sebesar 2.548 kunjungan dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 698 kunjungan dan tahun 2020 jumlah kunjungan pelayanan rehabilitasi medik turun menjadi 53 kunjungan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terbatasnya unit rehabilitasi medik dalam memberikan pelayanan, karena adanya bencana non alam pandemi Covid-19 dimana terdapat pembatasan pelayanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma. Selain itu juga dikarenakan adanya pemberlakuan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dimana pelayanan rehabilitasi medik hanya bisa dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 minggu.

**i) Pelayanan Psikometri**

Pelayanan psikometri Tahun 2020 sebesar 2,062 pemeriksaan dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 2.468 pemeriksaan. Menurunnya jumlah pemeriksaan disebabkan bencana non alam pandemi Covid-19 dimana terdapat pembatasan pelayanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma,

berkurangnya permintaan tes kesehatan jiwa. Tidak seperti tahun sebelumnya dimana permintaan tes kesehatan jiwa meningkat sebagai persyaratan rekrutmen pegawai, penempatan pegawai bahkan untuk persyaratan pemilihan pejabat publik. Pada tahun 2020 RSJ Mutiara Sukma telah melaksanakan kegiatan integrasi dan mobile klik di 9 Kabupaten/kota di provinsi NTB.

**j) Pelayanan Psikiatri Anak “Mental Sehat Ceria” (MSC)**

Pelayanan psikiatri anak adalah klinik yang menangani kasus kejiwaan pada anak dan remaja. MSC juga memiliki fasilitas untuk melayani pasien dengan permasalahan pada tumbuh kembangnya. Adapun pelayanan yang terdapat di klinik MSC antara lain : konsultasi dengan spesialis konsultan jiwa anak, pelayanan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik seperti terapi wicara, terapi okupasi, fisioterapi. Selain itu MSC juga melayani pemeriksaan fisik dan mental, tes IQ, konseling psikolog, tes kepribadian, tes bakat minat, tes perkembangan, dan tes kesiapan masuk sekolah pada anak-anak. Jumlah kunjungan di klinik MSC tahun 2020 sebesar 2,271 kunjungan dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 3.593 kunjungan.

**k) Pelayanan Gigi dan Mulut**

Jumlah kunjungan poliklinik gigi dan mulut pada tahun 2020 menurun sebesar 48,23% dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020 jumlah kunjungan ke poliklinik Gigi dan mulut sebesar 88 kunjungan pemeriksaan dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebanyak 170 kunjungan. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem layanan ke poli gigi dan mulut terkait adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan jenis pembayaran, sebagian besar pasien poliklinik gigi dan mulut adalah adalah pasien BPJS yakni sebanyak 57 kunjungan sedangkan pasien umum sebesar 31 kunjungan.

**l) Pelayanan Radiologi**

Pada tahun 2019 radiologi tidak melakukan pelayanan pemeriksaan pasien disebabkan karena kerusakan sarana dan prasarana akibat gempa bumi, perbaikan gedung kantor dan perbaikan alat-alat penunjang pelayanan, sehingga pelayanan radiologi tidak dapat berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 pelayanan radiologi mulai beroperasi dan pasien mulai meningkat, sehingga tahun 2020 kunjungan pasien radiologi sebesar 1.100 kunjungan, peningkatan jumlah

kunjungan radiologi tahun 2020 disebabkan karena banyaknya permintaan pelayanan rontgen untuk pemeriksaan Covid-19.

## **B. Pencapaian Kinerja Pelayanan *Ekstramural***

Pelayanan *ekstramural* adalah pelayanan langsung ke masyarakat yang dikoordinir oleh Instalasi Kesehatan Jiwa masyarakat (Keswamas)

### **a. Kegiatan integrasi dan *mobile clinic* kesehatan jiwa**

Pelayanan *ekstramural* integrasi dan *mobile clinic* pada tahun 2020 dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas dengan pertimbangan efektifitas pelayanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya, serta mampu berperan aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa, termasuk di dalamnya pendampingan pelayanan pengobatan dan upaya penemuan kasus baru gangguan jiwa. Sasaran kegiatan ini adalah dokter dan petugas kesehatan dengan bentuk kegiatan berupa pelayanan pengobatan, penyuluhan dan bimbingan teknis tentang pelayanan kesehatan jiwa. Sepanjang tahun 2020 kegiatan ini telah mencakup sebanyak 225 orang pada Sembilan (9) kabupaten/kota.

### **b. Kegiatan *Home Visit***

Kegiatan *home visit* lebih difokuskan pada penanganan pasien pasung dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien pasung baik yang pernah dirawat namun tidak pernah lagi menjalani perawatan setelah kembali ke rumah atau kasus pasung yang baru. Untuk tahun 2020 kegiatan *home visit* hanya dilakukan 1x pada bulan Februari di Kabupaten Lombok timur, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran dari pemerintah daerah.

### **c. Kegiatan Penanganan Pasien Pasung**

Penyisiran atau penjangkauan langsung pasien pasung mulai dilaksanakan tahun 2011 dan tercatat tahun 2020 RSJ Mutiara Sukma menjangkau 62 pasien pasung, dan total sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 792 pasien pasung. Semua pasien pasung yang ditemukan mendapat penanganan dari RSJ Mutiara Sukma (100% tertangani). Pelaksanaan “NTB Bebas Pasung” yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Dinas Kesehatan serta masyarakat adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian positif kegiatan tersebut.

Meskipun kegiatan ini telah selesai, namun RSJ Mutiara Sukma tetap berkomitmen untuk menjangkau pasien pasung di provinsi NTB.

**d. Kegiatan *Dropping* pasien**

Kegiatan *dropping* pasien adalah upaya RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien yang telah selesai menjalani perawatan karena keluarganya tidak mampu menjemput kembali. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya sesuai dengan standar pelayanan RSJ Mutiara Sukma. Selama tahun 2020 tidak ada pasien yang di *dropping*. Hal ini disebabkan karena adanya bencana non alam pandemi Covid-19.

**e. Kegiatan penanganan gangguan jiwa korban bencana/konflik Kegiatan**

Tahun 2020 sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 jadi untuk kegiatan DKJPS (Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial) pada para penyintas di daerah terdampak di setiap Kabupaten/Kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa hanya dilakukan melalui Online. Webinar DKJPS dimasa pandemi Covid-19 lebih difokuskan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan terlibat langsung dengan pasien yang positive Covid-19. RSJ Mutiara Sukma juga mengadakan kerjasama dengan RSDC (Rumah Sakit Darurat Covid) untuk memberikan pelayanan DKJPS kepada tenaga kesehatan dan pasien yang berada di RSDC

**f. *Accertive Community Therapy* (ACT)**

Kegiatan ACT atau terapi komunitas adalah bentuk terapi yang berusaha memanipulasi lingkungan untuk keuntungan pasien di lingkungan sosialnya. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus penyalahgunaan NAPZA atau individu dengan gangguan/ketidakmampuan fungsi normal kehidupannya atau keluarga yang tidak mampu melakukan perawatan terhadap pasien yang mengalami masalah kejiwaan di masyarakat.

Bentuk layanan yang diberikan adalah :

- 1. Layanan ACT statis** : dilakukan di poliklinik maupun ruang rawat inap RSJ Mutiara Sukma, dengan sasaran pasien yang kriterianya ditentukan oleh profesional pemberi asuhan.

2. **Layanan ACT *mobile*** : dengan kunjungan pada pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan dukungan tim KESWAMAS.

**g. Kegiatan *Self Help Group (SHG)* Kesehatan Jiwa**

Kegiatan SHG adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menangani gangguan jiwa di masyarakat dengan membentuk suatu kelompok yang disebut kelompok swa-bantu. Unsur kelompok SHG adalah penderita gangguan jiwa dan keluarganya serta pemerhati gangguan jiwa yang dibina oleh tim *Community Mental Health Nursing (CMHN)* yang ada di Puskesmas setempat dan tim ACT RSJ Mutiara Sukma.

Untuk tahun 2020, tidak ada kegiatan SHG yang dilakukan karena adanya bencana non alam pandemi Covid-19.

**h. Kegiatan *Ekstramural* lainnya**

Kegiatan lain yang dilaksanakan Instalasi Keswamas adalah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, *workshop* dan temu konsultasi kesehatan jiwa, serta penyebaran buletin Mutiara Jiwa dan *leaflet*. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum, kelompok berisiko, tokoh agama/tokoh masyarakat dan institusi swasta maupun pemerintah. Tujuan kegiatan adalah untuk sosialisasi dan promosi tentang pelayanan, fasilitas dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jiwa di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, sehingga diharapkan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB mendapat dukungan dalam pelaksanaan pelayanan program kesehatan jiwa dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta sebagai bentuk keseriusan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa

Khusus untuk klien NAPZA dan HIV/AIDS yang menjalani perawatan atau pernah dirawat di RSJ Mutiara Sukma, temu konsultasi diadakan dalam bentuk *Family Support Group (FSG)* dengan melibatkan keluarganya. Kegiatan *outing* yang merupakan bagian dari terapi juga dilaksanakan khusus untuk klien NAPZA. Tahun 2020 Klien NAPZA telah melakukan *Outing* sebanyak 1 kali ke Lombok Barat.

### **C. Promosi Kesehatan Rumah Sakit**

Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Dimana Promosi Kesehatan dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal, termasuk sumber daya manusia yang profesional. Instalasi PKRS RSJ Mutiara Sukma terbentuk mulai tahun 2020. Pada tahun 2020 Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) telah melakukan 10 kegiatan antara lain : 1) Identifikasi kebutuhan leaflet seluruh unit di RSJ Mutiara Sukma, 2) Membuat 10 video edukasi, 3) Mencetak 1 edisi buletin sebanyak 1000 eksemplar, 4) Memasang poster pada tempat yang sering dilewati oleh petugas dan pasien, 5) Memasang *Roll Up* baik di rawat jalan maupun rawat inap, 6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan di poliklinik RSJ Mutiara Sukma, 7) Menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI), 8) Bekerjasama dengan tim Humas dalam rangka menyebarluaskan edukasi pada masyarakat tentang Covid-19, 9) Bekerjasama dengan instalasi keswamas dalam rangka membuat video layanan kesehatan jiwa, 10) Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga yang dilaksanakan di pelayanan rawat inap, jalan dan IGD, dll.

### **D. Pencapaian Kinerja Pelayanan Penunjang**

Kegiatan pelayanan penunjang medis merupakan kegiatan yang sifatnya membantu pelayanan medis untuk menegakkan diagnosis dan rehabilitasi medik pasien serta menunjang kegiatan pelayanan lainnya. Kegiatan penunjang yang tersedia di RSJ Mutiara Sukma adalah instalasi farmasi, laboratorium, gizi, IPSRS serta Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).

#### **1) Pelayanan Farmasi**

Tahun 2020 semua resep yang masuk ke instalasi farmasi 100% terlayani. Jumlah kunjungan di instalasi farmasi dihitung berdasarkan jumlah kertas resep yang dilayani. Jumlah kunjungan berdasarkan jumlah kertas resep tahun 2020 adalah 36,021 kunjungan, menurun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 66,721. Jumlah resep yang ditulis oleh dokter tahun 2020 menurun menjadi 92,822 resep dibanding tahun 2019 yaitu 168,438 resep. Sesuai standar (telaah resep), jumlah peresepan obat per lembar harus kurang dari 7 item obat agar tidak

terjadi polifarmasi. Data tahun 2020 rata-rata jumlah peresepan obat perlembar adalah 3 item obat sehingga berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa peresepan obat di RSJ Mutiara Sukma masih memenuhi standar.

## **2) Pelayanan Laboratorium**

Jumlah pemeriksaan di instalasi laboratorium tahun 2020 sebanyak 13.865 pemeriksaan meningkat sebesar 49,08% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 7.060 pemeriksaan. Kunjungan ke instalasi laboratorium RSJ Mutiara Sukma untuk tahun 2020 terbanyak berasal dari poliklinik (64,52%), sedangkan jenis pemeriksaan terbanyak adalah pemeriksaan rapid tes sebesar (19,55%). Berdasarkan status pembayaran, terbanyak adalah umum (62,14%), sisanya adalah pasien BPJS (34,46%) dan bebas bayaran sebesar (3,40%).

## **3) Pelayanan Gizi**

Kegiatan di instalasi gizi di RSJ Mutiara Sukma meliputi: penyelenggaraan makanan, pelayanan gizi di ruang rawat, penyuluhan dan konsultasi gizi serta melaksanakan penelitian gizi terapan. Berdasarkan laporan penyediaan makanan dari instalasi gizi pada tahun 2020 secara akumulatif jumlah permintaan makanan mengalami penurunan sebesar 31,21% dibandingkan tahun 2019. Jumlah permintaan makanan yang dilayani tahun 2020 sebanyak 62,085 porsi dengan rincian diet biasa 54,905 porsi dan diet khusus 7,180 porsi. Hal ini disebabkan karena penurunan kunjungan pasien rawat inap yang salah satu penyebabnya adalah adanya bencana non alam pandemi Covid-19, dan dampak dari penetapan peraturan sistem rujukan berjenjang oleh BPJS.

## **4) Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)**

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit merupakan salah satu instalasi penunjang kegiatan yang ada di Rumah Sakit yang mampu menunjukkan kinerja profesionalnya untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan IPSRS di RSJ Mutiara Sukma meliputi pemeliharaan/perbaikan alat medis, non medis, dan bangunan, pelayanan laundry, serta pengelolaan kesehatan lingkungan di RSJ Mutiara Sukma.

Berdasarkan laporan dari IPSRS jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang dikerjakan tahun 2020 sebanyak 1.808 kegiatan. Frekuensi kegiatan IPSRS tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.358 kegiatan dan ruang rawat inap merupakan ruangan dengan frekuensi kegiatan

terbanyak yakni 663 kegiatan atau 33,50%. Peningkatan ini karena banyaknya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang perlu diperbaiki atau dipelihara. Selain itu, SOP pemeliharaan mulai ditertibkan dimana setiap permintaan harus disertai laporan tertulis.

#### **5) Pelayanan Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

Instalasi Diklat memegang peranan penting bagi RSJ Mutiara Sukma karena instalasi Diklat merupakan unit yang mengkoordinir kegiatan peningkatan kualitas SDM RSJ Mutiara Sukma baik melalui pendidikan formal maupun informal, workshop, seminar maupun pelatihan lainnya. Selain itu, instalasi diklat merupakan salah satu *revenue center* yang berkontribusi cukup besar bagi income RSJ Mutiara Sukma melalui penerimaan mahasiswa praktek, penelitian dan penyewaan aula rumah sakit.

Berdasarkan laporan dari instalasi Diklat, total institusi yang melakukan Praktek Kerja Lapangan maupun magang, penelitian, serta studi banding tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan adanya bencana non alam pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pendidikan kemahasiswaan baik berupa praktik, magang maupun pengambilan data/penelitian banyak yang menunda bahkan membatalkan kegiatan praktik yang akan dilaksanakan di RSJ Mutiara Sukma. Dimana pada tahun 2019 ada 12 institusi dengan rincian untuk program Strata I dan dan Diploma IV ada 5 institusi, untuk tingkat diploma III ada 6 institusi, sedangkan untuk tingkat SMK/ sederajat ada 1 institusi.

Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 5 institusi yang melaksanakan praktek kerja lapangan di RSJ Mutiara Sukma diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Atas maupun Perguruan Tinggi dengan rincian untuk Program Strata I dan Diploma IV yang melaksanakan praktek ada 4 institusi dan untuk tingkat Diploma III ada 1 institusi yang melaksanakan praktik, magang maupun penelitian.

#### **6) Pelayanan Kerjasama**

Kerjasama dengan pihak di luar RSJ Mutiara Sukma dikoordinir oleh urusan umum. Kesepakatan atau kerjasama RSJ Mutiara Sukma dengan pihak di luar RSJ Mutiara Sukma tidak hanya dengan institusi kesehatan tetapi juga dengan instansi non kesehatan, baik dengan institusi pemerintah maupun swasta. Berdasarkan laporan dari urusan umum, tahun 2020 kesepakatan pelayanan kerjasama sebanyak 35 kesepakatan menurun dibandingkan tahun 2019 yakni

sebanyak 62 kesepakatan pelayanan kerjasama. Penurunan ini disebabkan karena ada perubahan status kerjasama seperti dokter dan Tenaga Harian lepas menjadi pegawai kontrak di RSJ Mutiara Sukma.

## 2. Pencapaian Kinerja Keuangan RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020

Realisasi total belanja pengeluaran RSJ Mutiara Sukma tahun 2020 sebesar 91,79% dibandingkan total anggaran. Hal ini berarti Realisasi pengeluaran RSJ Mutiara Sukma tergolong baik karena hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan (> 90%).

Realisasi pendapatan BLUD tahun 2020 telah melampaui target, dari 14.718.499.655,11 yang ditargetkan dan tercapai sebesar Rp.23.912.559.721,41 atau 162,47%. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi klaim Covid-19 sebesar Rp.7.736.791.700,00 (32,35%) dan realisasi Klaim BPJS sebesar Rp.10.367.204.797,00 (43,35%) dari total pendapatan.

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSJ Mutiara Sukma

#### 1) Tingkat Kinerja Pelayanan

Tingkat kinerja pelayanan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dapat digambarkan melalui pencapaian indikator kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Program pelayanan Adminstrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listri	Jumlah jenis jasa sumber daya	3 Jenis	3 Jenis
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	15 Orang	15 Orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal	Jumlah Unit	1 Unit	1 Unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang	39 Orang	39 Orang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan kesehatan jiwa	33000 orang	34.457 orang

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani	65 orang	86 orang
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan	Nilai tindak lanjut akreditasi dari rekomendasi perencanaan strategis	80	80
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Pembangunan rumah sakit	Jumlah Unit	1 Unit	1 Unit
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Unit	78 Unit	78 Unit
	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah Jenis	13 Jenis	13 Jenis
	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumah Unit	72 Unit	72 Unit
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Jumlah Unit	81 Unit	81 Unit
Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Unit	11 Unit	11 Unit
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan	14.718.499.655,11	23.912.559.721,41

Urusan Keuangan RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020

## 2. Tingkat Kinerja Keuangan

Tingkat kinerja keuangan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dapat digambarkan melalui pencapaian indikator kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>22,191,536,550.00</b>	<b>21,290,721,327.00</b>	<b>95.94</b>
	A. Gaji dan Tunjangan	14,672,664,850.00	14,330,710,497.00	97.67
	B. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1,040,000,000.00	840,000,000.00	80.77
	C. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1,191,600,000.00	1,122,600,000.00	94.21
	D. Tambahan penghasilan PNS	5,287,271,700.00	4,997,410,830.00	94.52
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>33,621,841,862.14</b>	<b>29,942,744,416.20</b>	<b>89.06</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>549,984,537.00</b>	<b>488,718,922.00</b>	<b>88.86</b>
	A. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	411,747,037.00	369,081,422.00	89.64
	B. Penyedia jasa administrasi keuangan	138,237,500.00	119,637,500.00	86.54
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>275,000,000.00</b>	<b>273,127,000.00</b>	<b>99.32</b>
	A. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	275,000,000.00	273,127,000.00	99.32
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>	<b>115,131,396.00</b>	<b>115,131,396.00</b>	<b>100.00</b>
	A. Pendidikan dan pelatihan formal	115,131,396.00	115,131,396.00	100.00
<b>4.</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>6,098,276,901.00</b>	<b>5,802,399,362.00</b>	<b>95.15</b>
	A. Peningkatan kesehatan masyarakat	4,642,250,911.00	4,421,170,911.00	95.24
	B. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1,456,025,990.00	1,381,228,451.00	94.86
<b>5.</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>85,050,000.00</b>	<b>85,050,000.00</b>	<b>100.00</b>
	A. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	85,050,000.00	85,050,000.00	100.00
<b>6.</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>5,909,246,419.00</b>	<b>5,526,768,011.00</b>	<b>93.53</b>
	A. Pembangunan rumah sakit	845,294,013.00	725,333,700.00	85.81
	B. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	1,006,665,350.00	943,408,131.00	93.72
	C. Pengadaan obat-obatan rumah sakit	2,697,586,621.00	2,697,295,350.00	99.99
	D. Pengadaan mebeleur rumah sakit	218,222,000.00	218,140,000.00	99.96
	E. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	1,141,478,435.00	942,590,830.00	82.58
<b>7.</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>4,271,843,000.00</b>	<b>3,701,376,081.00</b>	<b>86.65</b>
	A. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	4,271,843,000.00	3,701,376,081.00	86.65
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>16,317,309,609.14</b>	<b>13,950,173,644.20</b>	<b>85.49</b>
	A. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	16,317,309,609.14	13,950,173,644.20	85.49
	<b>TOTAL SKPD</b>	<b>55,813,378,412.14</b>	<b>51,233,465,743.20</b>	<b>91.79</b>

Sumber : Urusan Keuangan RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta berdasarkan review I Renstra RSJ Mutiara Sukma, maka dilakukan analisa terhadap kebutuhan kegiatan untuk tahun 2021 berdasarkan permasalahan, situasi dan kondisi serta perubahan-perubahan yang kemungkinan akan dihadapi rumah sakit dan tertuang dalam tabel berikut ini:

**Tabel T-C.3.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPN Tahun 2022**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>							
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai Sakip OPD</b>	<b>79</b>	<b>50.673.645.694,74</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai Sakip OPD</b>	<b>79</b>	<b>50.673.645.694,74</b>	
-	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji ASN</b>	<b>100%</b>	<b>26.554.081.102,25</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji ASN</b>	<b>100%</b>	<b>26.554.081.102,25</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	265	26.554.081.102,25	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	265	26.554.081.102,25	
-	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Terpenuhinya standar pelayanan minimal</b>	<b>60%</b>	<b>96.110.696,75</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Terpenuhinya standar pelayanan minimal</b>	<b>60%</b>	<b>96.110.696,75</b>	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	282	96.110.696,75	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	282	96.110.696,75	
-	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>12.469.882,35</b>	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>12.469.882,35</b>	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan	12	12.469.882,35	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan	12	12.469.882,35	
-	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan</b>	<b>Persentase pengadaan barang</b>	<b>100%</b>	<b>420.484.298,28</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>420.484.298,28</b>	

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>							
	pemerintah daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			penunjang urusan pemerintah daerah	penunjang urusan pemerintah daerah			
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	1	420.484.298,28	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	1	420.484.298,28	
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	163.517.382,48	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	163.517.382,48	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3 Jenis	163.517.382,48	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3 Jenis	163.517.382,48	
-	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase realisasi pendapatan BLUD	77,81%	23.426.982.332,63	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase realisasi pendapatan BLUD	77,81%	23.426.982.332,63	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	23.426.982.332,63	23.426.982.332,63	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	23.426.982.332,63	23.426.982.332,63	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SPM yang mencapai target	75%	10.339.417.901,64	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SPM yang mencapai target	75%	10.339.417.901,64	
		Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	80%			Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	80%		
-	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana,	91%	8.852.516.381,95	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana,	91%	8.852.516.381,95	

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>							
	<b>kehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>prasarana dan alat kesehatan</b>			<b>kehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>prasarana dan alat kesehatan</b>			
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	1.531.075.000	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	1.531.075.000	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	476.857.954,23	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	476.857.954,23	
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	72	1.393.517.080,58	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	72	1.393.517.080,58	
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit mebeleur	81	92.751.419,54	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit mebeleur	81	92.751.419,54	
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	40	521.075.052,84	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	40	521.075.052,84	
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	4.837.239.874,76	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	4.837.239.874,76	
-	<b>Penyediaan layanan kehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>1.085.972.728,56</b>	<b>Penyediaan layanan kehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>1.085.972.728,56</b>	

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
1	2	3							
	<b>provinsi</b>				<b>daerah provinsi</b>				
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	4,320	138.843.022,88	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	4,320	138.843.022,88	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	35,460	252.287.898,10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	35,460	252.287.898,10	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	310	99.057.061,67	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	310	99.057.061,67	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	80	577.890.464,45	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	80	577.890.464,45	
	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	540	17.894.281,46	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	540	17.894.281,46	
-	<b>Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi</b>	<b>80%</b>	<b>400.928.791,13</b>	<b>Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi</b>	<b>80%</b>	<b>400.928.791,13</b>	
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	400.928.791,13	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	400.928.791,13	

No	RANCANGAN AWAL RKPD (Berdasarkan Renstra)				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	100%	7.818.449.196,76	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	100%	7.818.449.196,76	
-	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji pegawai NON ASN	100%	7.818.449.196,76	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji pegawai NON ASN	100%	7.818.449.196,76	
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai NON ASN/Kontrak	150 Orang	7.818.449.196,76	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai NON ASN/Kontrak	150 Orang	7.818.449.196,76	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan sesuai standar, RSJ Mutiara Sukma memerlukan dukungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bahwa rumah sakit yang belum terakreditasi tidak dapat lagi bermitra dengan BPJS Kesehatan. Adapun salah satu kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 pasal 13 bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bantuan pembiayaan untuk proses akreditasi, dengan persyaratan wajib adalah ASPAK dan pemenuhan tenaga teknis dokter spesialis kedokteran jiwa/psikiater dan dokter spesialis penunjang seperti : dokter spesialis syaraf, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis patologi klinik dll yang wajib memiliki surat izin praktek di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.
2. Kondisi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB saat ini sangat jauh berubah, selain sebagai lahan praktek bagi siswa kesehatan juga penambahan jenis pelayanan : RSJ Mutiara Sukma memiliki 7 ruang perawatan antara lain: 1) Melati, 2) Angsoka, 3) Dahlia, 4) Mawar, 5) Anggrek (Rehabilitasi NAPZA), 6) Wijaya Kusuma, 7) Kenanga, dengan kapasitas Tempat Tidur tersedia 101 Tempat Tidur.
3. Pembayaran gaji pegawai Non PNS RSJ Mutiara Sukma tahun 2020 menggunakan alokasi anggaran APBD dan BLUD pada anggaran pendukung pelayanan dan penunjang pelayanan wajib, sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai standar tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran pelayanan dan mutu pelayanan RSJ Mutiara Sukma.
4. Realisasi Pendapatan RSJ Mutiara Sukma s.d Juni 2021 belum mencapai target, berikut rinciannya :

No	Target 2021	Realisasi Pendapatan (Rp)				Proyeksi Pendapatan (Rp)	Kendala
		Tahun 2020	%	s.d Juni 2021	%	S/d Desember 2021	
1	19.500.000.000,00	23.912.559.721,41	162,47	9.241.552.998,29	47,39	19.500.000.000,00	Keterlambatan pembayaran klaim BPJS

Dari keadaan diatas maka dapat digambarkan kebutuhan yang prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2022 antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
- b. Peningkatan program upaya kesehatan masyarakat dengan pemenuhan ketersediaan tenaga teknis di bidang kesehatan diantaranya dokter spesialis kedokteran jiwa/psikiater, dokter spesialis penunjang, dokter umum, keperawatan dan lain-lain yang memiliki SIP dan SIK di RSJ Mutiara Sukma.
- c. RSJ Mutiara Sukma menjadi RS Afiliasi Pendidikan.
- d. Pengembangan gedung pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang sesuai standar.
- e. Pengadaan peralatan kedokteran dan alat-alat kesehatan sesuai prioritas kebutuhan yang berstandar.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan rencana kegiatan program pelayanan kesehatan jiwa di RSJ Mutiara Sukma untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan untuk mewujudkan visi, misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mendukung maksud tersebut, maka tujuan dari Renja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2022 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan kesehatan
2. Menjadi acuan kerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang urusan kesehatan
3. Menjadi acuan penilaian kinerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	1.1 Terwujudnya kualitas layanan kesehatan jiwa masyarakat	1.1 Indeks kepuasan masyarakat	1.1.1 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan jiwa	1.1.1.1 Status akreditasi rumah sakit	Status akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan:

#### 1. Program Penunjang urusan pemerintahan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

##### a. Administrasi keuangan perangkat daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Pada permendagri 90 tahun 2019 kegiatan administrasi keuangan merupakan pengganti dari Belanja Tidak Langsung, yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, dimana anggaran kegiatan ini meningkat setiap tahunnya karena jumlah ASN di RSJ Mutiara Sukma selalu meningkat.

##### b. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Tahun 2018, realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pegawai RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB baru mencapai 29,61% atau belum mencapai target 60% (sesuai standar akreditasi). Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan *inhouse training* yang telah dijadwalkan sebelumnya tidak dapat terlaksana karena kerusakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di RSJ Mutiara Sukma akibat bencana gempa bumi. Tahun 2019-2020, target kegiatan pendidikan dan pelatihan formal masih dibawah standar 60%, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 RSJ Mutiara Sukma masih dalam proses renovasi sarana prasarana yang rusak, sedangkan pada tahun 2020 anggaran diklat RSJ Mutiara Sukma di refocusing, dan tahun 2021-2023 target kegiatan pendidikan dan pelatihan formal telah ditetapkan sesuai standar yaitu minimal 60% dari jumlah total pegawai harus terpapar pendidikan dan pelatihan. Jadi tahun 2019-2020 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal di RSJ Mutiara Sukma belum sesuai standar akreditasi.

##### c. Administrasi umum perangkat daerah

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan diperuntukkan bagi pengadaan alat tulis kantor seperti kertas, tinta printer, buku, ballpoint, dan lain-lain untuk menunjang kegiatan administrasi di RSJ Mutiara Sukma.

**d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**

- Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan

Pada tahun 2021, RSJ menganggarkan pengadaan 1 unit ambulance transport untuk menunjang pelayanan di RSJ Mutiara Sukma. Direncanakan tahun 2022 dan 2023 RSJ Mutiara Sukma dapat menambah masing-masing 1 unit kendaraan operasional setiap tahunnya. Hal ini berhubungan dengan perkembangan struktur RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

**e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini terdiri dari belanja internet, air dan listrik RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB selama 5 tahun. Untuk penggunaan jasa komunikasi/internet selama 5 tahun akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terpasang pada semua ruang pelayanan sehingga membutuhkan penggunaan internet yang jauh lebih besar dari tahun 2018. Selain itu juga dengan berkembangnya teknologi maka kebutuhan internet untuk kegiatan perkantoran juga meningkat. Pada tahun 2018 kebutuhan internet RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB sebesar 60 mbps dan perkiraan pada tahun 2019 – 2023 kebutuhan internet RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB mencapai 120 mbps.

Kebutuhan sumber daya air dan listrik RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB selama 5 tahun juga meningkat disebabkan oleh adanya penambahan gedung kantor dan ruang perawatan sesuai dengan pengembangan pelayanan. Hal ini berpengaruh kepada kenaikan jumlah pasien serta peningkatan jumlah SDM RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap kebutuhan sumber daya air dan listrik. Tahun 2018 kebutuhan sumber daya listrik sebanyak 147 KVA sedangkan tahun 2019 – 2023 kebutuhan sumber daya listrik RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB meningkat rata-rata pertahun menjadi 200 KVA. Untuk kebutuhan sumber daya air pada tahun 2019 – 2023 relatif mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan.

**f. Peningkatan pelayanan BLUD**

- Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
  - i) Peningkatan kuantitas, kualitas dan profesionalisme SDM
  - ii) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
  - iii) Penyelenggaraan pelayanan NAPZA, HIV/AIDS
  - iv) Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  - v) Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana
  - vi) Publikasi, kerjasama, pengembangan SIMRS dan utilisasi sarana/prasarana/alat dalam rangka peningkatan pendapatan

Rincian Pembiayaan BLUD:

I. Biaya Operasional

A. Biaya Pelayanan

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Lain-lain

B. Biaya Umum dan Administrasi

1. Biaya pegawai
2. Biaya Administrasi Umum
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Lain-lain

II. Biaya Non Operasional

III. Biaya Pengeluaran Investasi

- A. Pembangunan Gedung Rumah Sakit
- B. Pembangunan Peralatan dan Mesin
- C. Pengeluaran alat kedokteran/ kesehatan
- D. Pengeluaran alat kantor dan RT
- E. Pengeluaran alat perlengkapan RS
- F. Pengeluaran mebel
- G. Pengeluaran komputer dan printer

## **2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

### **a. Penyediaan fasilitas pelayanan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi**

- Pengembangan rumah sakit

Kegiatan pembangunan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB terdiri dari pembangunan instalasi laundry dan CSSD pada tahun 2022, dan pembangunan gedung rawat inap isolasi pada tahun 2023.

- Rehabilitasi/renovasi dan pemeliharaan rumah sakit

Pada tahun 2021 – 2023, kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit terdiri dari rehabilitasi/renovasi bangsal melati pada tahun 2021, rehabilitasi gedung MSC (gedung autisme) 2022 dan rehabilitasi gedung rehab Napza pada tahun 2023. Kegiatan ini rehabilitasi gedung rehabilitasi direncanakan karena melihat fenomena tingginya angka pengguna Napza dan RSJ Mutiara Sukma ditetapkan sebagai salah satu rujukan rehabilitasi Napza. Sementara rehabilitasi gedung MSC direncanakan karena gedung yang pada awalnya milik Dinas Pendidikan Provinsi NTB ini sudah cukup lama terbengkalai dan kini beralih menjadi milik RSJ Mutiara Sukma.

- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan

Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB terdiri dari pembelian alat kesehatan rutin, USG 3 dimensi, lampu halogen dan alat-alat kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

- Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan

Sub kegiatan Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan diperuntukkan bagi pengadaan meubelir maupun perlengkapan kantor lainnya seperti meja dan kursi kerja serta lemari dokumen mengingat pasca gempa bumi tahun 2018 masih banyak meubelir di RSJ Mutiara Sukma dalam kondisi kurang baik.

- Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit

Sub kegiatan ini terdiri dari pengadaan AC, lampu jalan, AC standing, sepeda listrik, Kamera, *soundsystem*, CCTV, Laptop, Komputer, UPS dan lain-lain yang mendukung peningkatan pelayanan di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

- Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya

Pengadaan obat-obatan rumah sakit yang terdiri dari 13 jenis antara lain:

- 1) Anti Psikotik
- 2) Anti Depresi
- 3) Anti Mania
- 4) Anti Epilepsi dan Konvulsi
- 5) Anti Ansietas
- 6) Sedatif
- 7) Anti ADHD
- 8) Anti Dementia
- 9) Anti Parkinson
- 10) Neurotropik
- 11) Obat Umum
- 12) BAHP
- 13) Reagen

Selain pengadaan obat-obatan, pada sub kegiatan ini juga terdapat pengadaan makanan dan minuman bagi pasien rawat inap baik VIP, Kelas I, Kelas II, maupun Kelas III.

**b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi**

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan promotif dan preventif sehingga lebih banyak yang bersifat kegiatan ektramural seperti Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial yaitu kegiatan yang diperuntukkan bagi korban bencana, dimana terdiri dari skrining status mental masyarakat, sosialisasi tentang tanda dan gejala dari gangguan jiwa, serta konsultasi kesehatan jiwa dari psikiater dan psikolog klinis, deteksi dini kesehatan jiwa pada usia remaja dengan cara turun ke SMA sederajat di Provinsi NTB serta adanya system Si Indri (Sistem Informasi Deteksi Bunuh Diri) sehingga dapat meminimalisir angka kejadian bunuh diri di Provinsi NTB.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Sub kegiatan ini terdiri dari:

- a) *Self Help Group* (SHG) yaitu kegiatan pemberdayaan kelompok swabantu yang ada di masyarakat yang anggotanya dapat terdiri dari pasien, keluarga pasien, atau pemerhati orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dimana kegiatan kelompok ini berkoordinasi dan di pandu dari tim kesehatan jiwa masyarakat (Keswamas).
- b) Kegiatan *home visite* lebih difokuskan pada penanganan pasien pasung dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien pasung baik yang pernah dirawat namun tidak pernah lagi menjalani perawatan setelah kembali ke rumah atau kasus pasung yang baru.
- c) Integrasi dan *mobile clinic* adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya, serta mampu berperan aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa. Sasaran kegiatan ini adalah dokter dan petugas kesehatan di puskesmas dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan tentang pelayanan kesehatan jiwa.
- d) Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)  
Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Promosi Kesehatan dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal, termasuk sumber daya manusia yang profesional.
- e) *Dropping* dan rujukan pasien adalah upaya RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya setelah selesai menjalani perawatan dan tidak mampu dijemput kembali oleh keluarganya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA

Sub Kegiatan ini terdiri dari :

- a) Kegiatan *outing* yang bertujuan untuk penyegaran bagi pasien yang telah mengikuti kegiatan rehabilitasi Napza yang sangat padat serta untuk mempersiapkan pasien kembali ke lingkungan. Kegiatan *outing* dilaksanakan di *outdoor*.
- b) *Family Support Group* yaitu kegiatan dukungan keluarga dari para rehabilitan Napza.
- c) *Accertive Community Therapy* (ACT) atau terapi komunitas adalah bentuk terapi yang berusaha memanipulasi lingkungan untuk keuntungan pasien di lingkungan sosialnya. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus penyalahgunaan NAPZA atau individu dengan gangguan/ketidakmampuan fungsi normal kehidupannya atau keluarga yang tidak mampu melakukan perawatan terhadap pasien yang mengalami masalah kejiwaan di masyarakat. Program ACT didesain untuk menurunkan hospitalisasi, meningkatkan kemandirian, fungsi dan produktifitas individu serta memberi support pada keluarga. Dalam pelaksanaannya terapi ini membutuhkan tim yang terdiri dari multidisiplin ilmu seperti psikiater, dokter, perawat dan seorang koordinator.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

Sub kegiatan ini dianggarkan untuk pelayanan pasien tidak mampu dan terlantar baik pada ODMK maupun pada klien rehabilitasi Napza.

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Sub Kegiatan ini dianggarkan untuk kegiatan deteksi dini dan pemantauan tumbuh kembang anak antara lain adanya pemenuhan kebutuhan ruangan snoezellen, tes bakat minat pada anak, tes IQ, serta deteksi dini tumbuh kembang pada anak maupun balita.

### **c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi**

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

- a) Penilaian Akreditasi SNARS edisi 1 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dijadwalkan pada bulan September tahun 2019

- b) Kegiatan survei verifikasi ke 2 akreditasi KARS yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018, tetapi karena kondisi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB pasca gempa yang tidak memungkinkan untuk dilakukan survei verifikasi sehingga kegiatan ini diundur pada tahun 2019.
- c) Penilaian Akreditasi SNARS yang kedua dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dijadwalkan pada tahun 2022.

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi

- Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan

Sub Kegiatan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai Non PNS maupun tunjangan dokter spesialis kontrak/kerjasama di RSJ Mutiara Sukma. Sebagai satu-satunya Rumah Sakit Jiwa di provinsi NTB, maka RSJ Mutiara Sukma harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka sebagai BLUD RSJ Mutiara Sukma dapat merekrut pegawai Non PNS yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan dan jenis pelayanan di RSJ Mutiara Sukma, maka hampir setiap tahun RSJ Mutiara Sukma mengalami penambahan jumlah pegawai Non PNS.

**Tabel T-C.5**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**RSJ MUTIARA SUKMA**

Nama Perangkat Daerah: RSJ Mutiara Sukma

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai Sakip OPD</b>		<b>79</b>	<b>50.673.645.694,74</b>	-		<b>81</b>	<b>58.771.827.472,56</b>
-	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji ASN</b>		<b>100</b>	<b>26.554.081.102,25</b>	-		<b>100</b>	<b>30.797.702.668,47</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN		265	26.554.081.102,25	-		280	30.797.702.668,47
-	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Terpenuhinya standar pelayanan minimal</b>		<b>60</b>	<b>96.110.696,75</b>	-		<b>60</b>	<b>111.470.197,38</b>
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang		282	96.110.696,75	-		291	111.470.197,38
-	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaporkan</b>		<b>100</b>	<b>12.469.882,35</b>	-		<b>100</b>	<b>14.462.700,76</b>
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan		12	12.469.882,35	-		12	14.462.700,76
-	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>420.484.298,48</b>	-		<b>100</b>	<b>487.682.113,54</b>
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit		1	420.484.298,48	-		1	487.682.113,54
-	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang</b>		<b>100</b>	<b>163.517.382,48</b>	-		<b>100</b>	<b>189.649.180,75</b>

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		urusan pemerintah daerah							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya		3	163.517.382,48	-		3	189.649.180,75
-	<b>Peningkatan pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase realisasi pendapatan BLUD</b>		<b>77,81</b>	<b>23.426.982.332,63</b>	-		<b>100</b>	<b>27.170.860.611,66</b>
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD		23.426.982.332,63	23.426.982.332,63	-		27.170.860.611,66	27.170.860.611,66
2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>		<b>75</b>	<b>10.339.417.901,46</b>	-		<b>76,19</b>	<b>11.991.765.675,25</b>
		<b>Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar</b>		<b>80</b>		-	<b>80</b>		
-	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan</b>		<b>91</b>	<b>8.852.516.381,95</b>	-		<b>93</b>	<b>10.267.241.647,32</b>
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung		1	1.531.075.000,00	-		1	1.028.085.000,00
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit gedung		1	476.857.954,23	-		1	1.300.736.768,10
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes		72	1.393.517.080,58	-		96	1.616.215.772,86
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit mebeleur		81	92.751.419,54	-		85	107.574.072,33
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit		40	521.076.052,84	-		60	604.348.329,11
	Pengadaan obat, vaksin,	Jumlah jenis		13	4.837.239.874,76	-		13	5.610.281.704,92

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya								
-	<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>		<b>100</b>	<b>1.085.972.728,56</b>	-		<b>100</b>	<b>1.259.522.597,35</b>
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani		4.320	138.842.022,88	-		4,363	161,031.598,86
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani		35.460	252.287.989,10	-		36,020	292.606.158,83
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani		310	99.057.061,67	-		350	114.887.422,42
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani		80	577.890.464,46	-		80	670.243.441,32
	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani		540	17.894.281,46	-		550	20.753.975,92
-	<b>Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi</b>		<b>80</b>	<b>400.928.791,13</b>	-		<b>80</b>	<b>465.001.430,58</b>
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi		2 Dokumen	400.928.791,13	-		2 Dokumen	465.001.430,58
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>	<b>Persentase kapasitas sumber daya manusia</b>		<b>100</b>	<b>7.818.449.196,76</b>	-		<b>100</b>	<b>9.067.919.645,31</b>

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Manusia Kesehatan</b>	<b>kesehatan yang mencapai target</b>							
-	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji pegawai NON ASN		150	7.818.449.196,76	-		100	9.067.919.645,31
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai NON ASN/Kontrak		150	7.818.449.196,76	-		155	9.067.919.645,31

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang **GEMILANG**, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, dimana RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB mendukung misi ke-3 yaitu: “**NTB SEHAT DAN CERDAS**” Melalui peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

## 4.1 Sumber Daya RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB

## Rancangan Awal Renja 2022

## RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat

## RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2022

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai Sakip OPD</b>	<b>79</b>	<b>50.673.645.694,74</b>
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji ASN</b>	<b>100%</b>	<b>26.554.081.102,25</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	265	26.554.081.102,25
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Terpenuhinya standar pelayanan minimal</b>	<b>60%</b>	<b>96.110.696,75</b>
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang	282	96.110.696,75
	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>12.469.882,35</b>
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan	12	12.469.882,35
	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>420.484.298,28</b>
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit	1	420.484.298,28
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>163.517.382,48</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jenis sumber daya	3 Jenis	163.517.382,48
	<b>Peningkatan pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase realisasi pendapatan BLUD</b>	<b>77,81%</b>	<b>23.426.982.332,63</b>
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	23.426.982.332,63	23.426.982.332,63
	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>	<b>75%</b>	<b>10.339.417.901,64</b>
		<b>Persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar</b>	<b>80%</b>	

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan</b>	<b>91%</b>	<b>8.852.516.381,95</b>
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	1.531.075.000
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah unit gedung	1	476.857.954,23
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit alkes	72	1.393.517.080,58
	Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Jumlah unit mebeleur	81	92.751.419,54
	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Jumlah unit	40	521.075.052,84
	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah jenis	13	4.837.239.874,76
	<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>1.085.972.728,56</b>
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau beroperasi bencana	Jumlah orang yang terlayani	4,320	138.843.022,88
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	35,460	252.287.898,10
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	310	99.057.061,67
	Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah orang yang terlayani	80	577.890.464,45
	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah orang yang terlayani	540	17.894.281,46
	<b>Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi</b>	<b>Persentase elemen akreditasi yang terpenuhi</b>	<b>80%</b>	<b>400.928.791,13</b>
	Peningkatan mutu fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 Dokumen	400.928.791,13

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana Diusulkan (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target</b>	<b>100%</b>	<b>7.818.449.196,76</b>
	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk UKM dan UKM rujukan provinsi	Persentase pembayaran gaji pegawai NON ASN	100%	7.818.449.196,76
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai NON ASN/Kontrak	150 Orang	7.818.449.196,76



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB, Rencana Biaya dan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA BLUD RSJ Mutiara Sukma).

Rencana Kerja RSJ Mutiara Sukma yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan.

Rencana Kerja ini merupakan dasar monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan RSJ Mutiara Sukma yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan. Selain itu, Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar RSJ Mutiara Sukma serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil serta biaya terjangkau.

Demikian rancangan Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSJ Mutiara Sukma tahun 2022. Disadari bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Mataram, Agustus 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa  
MUTIARA SUKMA

**Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 19640805 199603 2 001